

# BAB 1: PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia sedang menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, yaitu beban ganda (*double burden*) dalam pelayanan kesehatan. Beban ganda ini mencakup dua masalah utama: pertama, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan yang signifikan, dan kedua, terdapat peningkatan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit tidak menular. Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi sesuai dengan kebijakan kementerian kesehatan Indonesia.<sup>(1)</sup>

Kondisi geografis negara Indonesia yang luas dan persentase jumlah penduduk yang sangat padat menyebabkan terbukanya akses lalu lintas antar daerah dalam negeri maupun antar negara yang dapat menimbulkan masuknya agen penyakit baru.<sup>(2)</sup> Secara global, lebih dari 60% kasus penyakit menular adalah penyakit *zoonosis*. Penyakit *zoonosis* adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Sekitar 70% dari penyakit *zoonosis* tersebut berasal dari satwa liar. Salah satu penyakit menular yang berbahaya di Dunia dan Indonesia adalah penyakit rabies.<sup>(3)</sup>

Rabies menyebabkan peradangan progresif dan fatal pada otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus rabies dari genus *Lyssavirus* dan famili Rhabdoviridae.<sup>(4)</sup> Penyakit rabies menyerang hewan peliharaan maupun hewan liar dan dapat tertular melalui air liur dari gigitan atau cakaran hewan. Pada hewan, anjing merupakan sebagai penular utama dari penyakit rabies yang akan berdampak pada sektor kesehatan masyarakat terutama masyarakat yang sangat miskin.<sup>(5)</sup>

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2018 melaporkan bahwa penyakit rabies telah terjangkit di 150 negara, dengan 95% kasus terjadi di Afrika dan Asia. Rabies menyebabkan 59.000 kematian manusia setiap tahunnya di seluruh dunia.<sup>(6)</sup> Di benua Asia, lebih dari 30.000 kematian terjadi setiap tahun dimana setiap 15 menit ada satu kematian akibat rabies dan diantara kematian tersebut, 15% kematian terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Beberapa negara di Asia seperti Jepang, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan yang telah berhasil mengatasi rabies pada anjing dan belum ada negara di Asia yang muncul kembali yang mampu menghilangkan rabies selama empat sampai lima tahun terakhir.<sup>(7)</sup> Di Asia Tenggara, penyakit rabies merupakan penyakit endemik, kecuali Brunei Darussalam yang selama ini secara historis menjadi negara bebas rabies.<sup>(8)</sup> Di Asia Tenggara diperkirakan 5000 orang meninggal karena rabies setiap tahun.<sup>(9)</sup>

Di Indonesia dari 34 provinsi, 26 provinsi dinyatakan sebagai daerah endemik rabies dan 8 provinsi yang masih dinyatakan sebagai daerah bebas rabies adalah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua dan Papua Barat sebagai daerah bebas historis, dan DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur sebagai daerah yang dideklarasikan bebas rabies.<sup>(10)</sup> Jumlah kasus rabies di Indonesia pada tahun 2022 terdapat 104.229 kasus rabies dan mengalami peningkatan sebanyak 82,04% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 57.257 kasus rabies. Sedangkan kematian akibat kasus rabies mencapai 102 kasus dan mengalami peningkatan 64,52% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 62 kasus kematian.<sup>(11)</sup>

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah endemis penyakit rabies di Indonesia. Melalui Dinas Kesehatan melaporkan sepanjang tahun 2022 terjadi 4.248 kasus gigitan hewan penular rabies (GHPH), sedangkan Januari hingga Mei 2023 tercatat 2.291 kasus. Melalui Balai Veteriner Bukittinggi melaporkan pada tahun 2022

terjadi 37 kasus positif rabies dan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2023 yaitu 67 kasus positif rabies di Provinsi Sumatera Barat. Selama tiga tahun terakhir ini, kasus positif rabies di Sumatera Barat banyak ditemukan pada hewan penular rabies anjing (112 kasus), kucing (15 kasus), Sapi (9 kasus), Kambing (4 kasus), Kerbau (2 kasus), Musang (1 kasus). Selama tahun 2021 – 2023, Kabupaten/Kota yang memiliki kasus positif rabies terbanyak di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota (50 kasus), Kabupaten Agam dan Sijunjung (21 kasus), Kabupaten Pasaman Barat (19 kasus).<sup>(12)</sup>

Jumlah kasus GHPR di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 sebanyak 88 kasus, Tahun 2022 sebanyak 119 kasus dan tahun 2023 sebanyak 146 kasus gigitan. Kasus rabies di Kabupaten Pasaman Barat selama 3 tahun terakhir ini sebanyak 19 kasus dimana 17 positif pada anjing dan 2 positif pada kucing. Sepanjang tahun 2023 telah terjadi 1 kasus kematian akibat rabies pada manusia.<sup>(13)</sup>

Tingkat kasus GHPR di Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami fluktuatif dan hal tersebut tidak terlepas dari topografi Kabupaten Pasaman Barat sendiri. Pertama, Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatra Barat. Pada tahun 2020, luas perkebunan kelapa sawit sebesar 185,324 ha. Meskipun demikian, banyak perkebunan lain yang berkembang di wilayah ini mulai dari kakao, karet, nilam, kopi, pinang, dan lainnya. Masyarakat memelihara anjing termasuk untuk menjaga area perkebunan dan rumah mereka.

Kedua, masyarakat memelihara anjing untuk kegiatan berburu babi hutan. Tradisi berburu babi hutan yang disebut Alek Buru dilaksanakan oleh sebagian masyarakat yang tergabung dalam organisasi Persatuan Olahraga Berburu Babi (PORBBI). Jumlah populasi anjing di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 sebanyak 2400 ekor.<sup>(13)</sup>

Ketiga, wilayah pasaman barat yang secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal di Utara, Kabupaten Pasaman di Timur, Kabupaten Agam di Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan serta Samudera Hindia di Barat. Hal ini mengakibatkan adanya kasus anjing impor ke dalam Kabupaten Pasaman Barat. Pemasukan anjing dari Pulau lain ke Sumatera terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga akan menimbulkan masalah baru yaitu anjing-anjing tersebut tidak terdata dan terpantau dengan baik.<sup>(14)</sup>

Perilaku masyarakat pemilik hewan terutama pemilik anjing berperan dalam upaya pencegahan rabies karena salah satu kendala yang dihadapi untuk penanggulangan rabies adalah kurangnya kesadaran masyarakat, baik di pedesaan maupun kota besar untuk memelihara hewan sesuai dengan peraturan yang telah ada dan menurut Utami dan Sumiarso (2012) bahwa sebanyak 70,1% responden tidak mengikat anjing peliharaan dengan rantai dan dibiarkan lepas berkeliaran, hanya 29,9% responden yang mengikat hewan peliharaannya.<sup>(15)</sup>

Perilaku kurang baik yang ditunjukkan oleh pemelihara hewan di daerah pedesaan memelihara anjing secara bebas atau tidak di ikat sehingga akan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Perilaku masyarakat lainnya adalah keengganan masyarakat melaporkan jika tergigit oleh HPR sehingga kasus kejadian rabies sulit dikontrol. Salah satu faktornya adalah menurut Penelitian di Nepal Dhakal *et al.*, (2023), menyatakan 18,2% responden mengunjungi pengobatan tradisional apabila tergigit HPR dan 60% Responden tidak akan melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat seseorang digigit anjing yang diduga rabies kepada pihak berwenang.<sup>(16)</sup>

Menurut WHO program pengendalian rabies yang efektif adalah dengan melakukan vaksinasi pada hewan penular rabies, pendidikan dan edukasi masyarakat, dan peningkatan vaksinasi pasca gigitan pada manusia. WHO merekomendasikan

bahwa setidaknya 70% populasi anjing harus divaksinasi untuk mengendalikan penularan rabies.<sup>(17)</sup> Di benua Eropa, kasus rabies pada manusia telah hilang karena adanya kebijakan berupa vaksinasi pada hewan khususnya anjing.<sup>(7)</sup>

Kebijakan vaksinasi rabies di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan.<sup>(18,19)</sup> Pemberantasan dan penanggulangan rabies di Indonesia menjadi tanggung jawab 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan), Kementerian Kesehatan (Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit), dan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan). Pengendalian dan penanggulangan rabies pada hewan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian seperti pelaksanaan vaksinasi, pengawasan, dan koordinasi kegiatan penanggulangan rabies, sementara itu dokter hewan yang berpraktik di klinik atau rumah sakit hewan juga dapat melakukan vaksinasi terhadap HPR milik individu atau masyarakat. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri membantu dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut melalui Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta perangkatnya. Untuk pencegahan dan pengendalian rabies pada manusia dan masyarakat menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.<sup>(20)</sup>

Pada tahun 2023 Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat melalui fungsi kesehatan hewan terus melaksanakan kegiatan vaksinasi rutin setiap pada hewan seperti anjing, kucing dan kerbau.<sup>(13)</sup> Anjing yang telah diberikan vaksin memiliki kekebalan terhadap rabies 6 kali lebih besar daripada anjing yang tidak diberikan vaksin, oleh sebab itu pemberian vaksin harus diberikan secara teratur sesuai rekomendasi<sup>(21)</sup> dan memenuhi cakupan vaksinasi rabies sebesar 70%.<sup>(22)</sup> Di

Kabupaten Pasaman Barat, cakupan vaksinasi rabies belum tercapai akibat belum meratanya alokasi vaksin rabies pada hewan.<sup>(13)</sup>

Realisasi vaksinasi rabies pada hewan penular rabies (HPR) di Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2020 dan 2021 sudah melebihi target vaksinasi, yakni sebanyak 4.421 dosis (target 2.500) pada tahun 2020 dan 1.759 dosis (target 700) pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2023 jumlah hewan yang di berikan vaksin rabies sebanyak 3900 ekor yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.<sup>(23)</sup> Data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat melaporkan bahwa proporsi vaksinasi rabies yang telah diberikan pada anjing dengan alokasi vaksin yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dibandingkan dengan populasi anjing yang ada selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, yakni pada tahun 2019 sebesar 25,7%, tahun 2020 sebesar 13,2%, tahun 2021 menurun hingga sebesar 6,4%, tahun 2022 sebesar 9%, dan tahun 2023 kembali naik hingga 10,9%.<sup>(24)</sup>

Penelitian terdahulu dari Huwae *et al.*, (2020) yang meneliti tentang Perilaku vaksinasi oleh pemilik anjing menemukan hasil bahwa sebagian besar responden tidak memberikan vaksin pada anjingnya yaitu sebanyak 67,5% dan yang memberikan vaksin 32,5% serta sebagian besar responden memiliki perilaku kurang terhadap pencegahan rabies yaitu sebanyak 64,9% dan yang memiliki perilaku baik sebanyak 35,1%.<sup>(25)</sup>

Sementara itu, di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, Fadillah *et al.*, (2021) menyatakan juga bahwa 63,5% Praktik pemilik anjing berada dalam kategori buruk. Sejalan dengan penelitian di Kota Administratif (Kotip) Cimahi, Jawa Barat terdapat hubungan pendidikan, pengetahuan sikap, sarana vaksinasi rabies, anjuran petugas, anjuran tokoh formal dan keterpaparan terhadap media penyuluhan terhadap ketidakpatuhan pemilik anjing memberikan vaksinasi rabies pada anjing.<sup>(26)</sup>

*World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa, rendahnya cakupan vaksinasi merupakan 1 dari 10 ancaman global, hal ini disebabkan oleh adanya fenomena keraguan terhadap vaksin di kalangan masyarakat yang disebut dengan *vaccine hesitancy*. *Vaccine hesitancy* didefinisikan oleh WHO sebagai perilaku vaksinasi pada masyarakat yang melakukan penundaan dalam penerimaan atau penolakan vaksin meskipun layanan vaksinasi tersedia. Fenomena ini merupakan masalah yang kompleks dan kontekstual, bervariasi di berbagai tempat, kelompok, dan vaksin yang berbeda. *Vaccine hesitancy* menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Ketidakmauan atau keraguan untuk divaksinasi dapat menyebabkan berkurangnya cakupan vaksinasi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya wabah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.<sup>(27)</sup>

Menurut *World Health Organization (2015)*, terdapat tiga unsur penyebab terjadinya keraguan vaksinasi, yaitu faktor individu dan kelompok, faktor kontekstual, dan faktor dari vaksinasi itu sendiri.<sup>(28)</sup>

Faktor individu dan kelompok seperti pengetahuan, sikap, dan persepsi yang mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies diteliti oleh Ritonga (2013) yang mendapati hasil bahwa pengetahuan ( $p\text{-value} = 0,000$ ,  $OR = 18,528$ ) mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies, dimana pemilik anjing yang memiliki pengetahuan baik mempunyai peluang 18,528 kali untuk melakukan vaksinasi rabies daripada yang memiliki pengetahuan tidak baik. Demikian juga dengan pemilik anjing yang memiliki sikap baik mempunyai peluang 8,406 kali untuk melakukan vaksinasi rabies.<sup>(29)</sup> Sudiatmika *et al.*, (2016) mendapati hasil penelitian bahwa persepsi terhadap rabies mempengaruhi perilaku rabies ( $OR = 3,09$ ; 95% CI: 1,20-7,97).<sup>(30)</sup>

Faktor kontekstual seperti jenis kelamin, budaya, dan pengaruh pemimpin, juga mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies. Sambo *et al.*, (2014) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki berhubungan signifikan dengan pemberian vaksinasi pada anjing (OR 1.55 , 95% CI 1.13–2.16).<sup>(31)</sup> Studi oleh Cleaveland *et al.*, (2014) menemukan faktor budaya menjadi pengaruh dalam perilaku vaksinasi rabies, yaitu adat istiadat di beberapa komunitas di Afrika menghormati anjing sebagai penjaga atau bagian dari ritual keagamaan dan hal tersebut mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi.<sup>(32)</sup> Sementara itu, Ritonga (2013) meneliti pengaruh anjuran tokoh masyarakat terhadap perilaku vaksinasi rabies, dimana hal tersebut didapati saling berhubungan signifikan dengan hasil bahwa pemilik anjing yang mendapat anjuran dari tokoh masyarakat mempunyai peluang sebesar 6,777 kali untuk melakukan vaksinasi rabies.<sup>(29)</sup>

Faktor berikutnya adalah faktor yang berasal dari program vaksinasi rabies itu sendiri, seperti adanya penyuluhan tentang vaksinasi rabies dan peran/dukungan dari profesional kesehatan. Ritonga *et al.*, (2013) menemukan bahwa dukungan petugas kesehatan mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies. Dimana pemilik anjing yang mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan memiliki peluang sebesar 6,736 kali untuk melakukan perilaku vaksinasi rabies daripada mereka yang tidak mendapatkan dukungan dari petugas kesehatan.<sup>(29)</sup> Selain itu, program vaksinasi rabies yang didukung dengan penyuluhan juga diyakini mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat. Hal ini diteliti oleh Sudiatmika *et al.*, (2016) dan mendapati hasil bahwa masyarakat yang telah mendapatkan penyuluhan memiliki peluang sebesar 2,4 kali untuk melakukan perilaku vaksinasi pada anjingnya dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan penyuluhan (PR=2,37; 95%CI=1,34-4,18).<sup>(30)</sup>

Berdasarkan kondisi di Kabupaten Pasaman Barat dan hasil penelitian yang dilakukan di berbagai tempat diatas, maka penulis tertarik melakukan analisis lebih dalam mengenai perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dan faktor yang mempengaruhinya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Rabies menjadi suatu beban masalah yang berat bagi masyarakat dunia. Kasus baru positif rabies di Kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir, yakni dari 3 kasus positif rabies pada anjing tahun 2021 kemudian naik menjadi 7 kasus positif rabies pada Anjing pada tahun 2022, dan 7 kasus positif rabies pada anjing tahun 2023. Sementara itu, proporsi vaksinasi rabies pada anjing di Kabupaten Pasaman Barat masih cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir, hingga tahun 2023 proporsi vaksinasi rabies pada anjing hanya sebesar 10,9%. Selain itu, rendahnya cakupan vaksinasi rabies pada Hewan Penular Rabies di Kabupaten Pasaman Barat juga menjadi urgensi dalam penelitian ini. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran perilaku vaksinasi rabies dan apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat dan faktor yang mempengaruhinya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui distribusi frekuensi perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

2. Mengetahui distribusi frekuensi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status pendidikan, agama, persepsi, sumber informasi, anjuran tokoh masyarakat, dukungan petugas kesehatan hewan, pengalaman vaksinasi sebelumnya, kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan, dan norma sosial budaya pada masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.
3. Mengetahui hubungan usia, jenis kelamin, pekerjaan, status pendidikan, agama, persepsi, sumber informasi, anjuran tokoh masyarakat, dukungan petugas kesehatan hewan, pengalaman vaksinasi sebelumnya, kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan, dan norma sosial budaya terhadap perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.
4. Mengetahui faktor yang paling dominan berhubungan terhadap perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.
5. Mengeksplorasi faktor dukungan tokoh masyarakat terhadap perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat
6. Mengeksplorasi faktor peran profesional kesehatan terhadap perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat
7. Mengeksplorasi faktor peran pelayanan kesehatan terhadap perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat.
8. Mengeksplorasi faktor kebijakan vaksinasi rabies terhadap perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat.
9. Mengeksplorasi norma sosial budaya terhadap perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumber informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan data dan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies dan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penanggulangan penyakit rabies.

#### **2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan bacaan bagi Mahasiswa dan Civitas Akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat guna mengembangkan penelitian pencegahan penyakit rabies.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies oleh pemilik anjing sehingga masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya penyakit rabies.

#### **4. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Sumatera Barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam kegiatan pencegahan penyakit rabies.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies oleh masyarakat pemilik anjing di Kabupaten Pasaman Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Mixed Method*. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku vaksinasi rabies dengan menggunakan desain studi *Cross Sectional* yang menggunakan data primer dengan instrumen kuesioner dan penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi mendalam dari informan mengenai faktor dukungan tokoh masyarakat, peran profesional kesehatan hewan, pelayanan kesehatan, kebijakan vaksinasi rabies, norma sosial budaya. Sedangkan variabel dalam penelitian kuantitatif meliputi usia, jenis kelamin, status pendidikan, pekerjaan, agama, persepsi, sumber informasi, anjuran tokoh masyarakat, dukungan petugas kesehatan hewan, pengalaman vaksinasi sebelumnya, kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan, dan norma sosial budaya.

